

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zaenuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Ahmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017, *Laporan Tahunan Tahun 2017*, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017, *Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2017-2022*, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017, *Statistik Kepariwisataaan 2017*, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- H.R, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- H.R, Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum dan Penelitian Administrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- H.R, Ridwan, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusumastato, Tridoyo, 2012, *Pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Spelt, N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Sukirno, Sadono, 2006, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, E., 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Winardi, J., 2002, *Motivasi & pemotivasian dalam manajemen*, Raja Persada Grafindo, Jakarta.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Heriansyah P., 2016, *Aspek Hukum Penatagunaan Tanah Pantai Hasil Reklamasi oleh Masyarakat di Pulau Barrang Lompo*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Lewaherilla, 2002, *Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*, Disertasi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Liandra, Wan Wahyu, 2018, *Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Meningkatkan Perekonomian Nelayan di Kabupaten Natuna Tahun 2016*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

M. Azwardin Marzuki, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Perairan Pesisir untuk Kegiatan Usaha di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Nurdin, Muhammad Fadli, 2014, *Pengaruh Kegiatan Wisata Bahari Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir*, Skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung.

C. Internet

Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, <https://www.kamusbesar.com/daya-beli>, diakses pada 21 September 2019.

Anonim, “Kamus Bisnis Online”, <http://kamusbisnis.com/arti/daya-beli/>, diakses pada 21 September 2019.

Binus University, *Probability Sampling Vs. Non-Probability Sampling*, <http://scdc.binus.ac.id/himsisfo/2017/03/probability-sampling-vs-non-probability-sampling/>, diakses pada 21 September.

Kementerian Pariwisata, “Deklarasi Djuanda dan Implikasinya Terhadap Kewilayahan Indonesia”, <http://www.kemenpar.go.id/post/deklarasi-djuanda-djuanda-dan-implikasinya-terhadap-kewilayahan-indonesia>, diakses pada 16 September 2019.

D. Jurnal, Makalah, dan Pidato

Basah, Sjachran, “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”, *makalah*, Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995.

Danil, Mahyu, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bieruen Aceh*, Vol. IV, No. 7, Maret, 2013.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, “Pemaparan Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2017-2022”, *Pidato*, Sidang Paripurna DPRD DIY, Yogyakarta, 2 Agustus 2017.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1146).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758).

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan.

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4 Seri E).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 10).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 61).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 53).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 67)